

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 13 dan 14

## Polrestabes Tunggu Hasil Audit BPK (Korupsi BRT Trans Semarang)

**SEMARANG** - Penyidik Unit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Semarang masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan ko-

rupsi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meminta keterangan terkait operasional bus tersebut, termasuk izin trayeknya.

Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Wiyono Eko mengatakan, audit kerugian negara dari kasus korupsi itu sangat penting karena bisa menjadi bukti kuat sebelum mengarah ke penyidikan untuk penetapan

tersangka.

"Masih berjalan, kami kumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau sudah oke semuanya, nanti akan disampaikan lagi (progresnya)," ungkapnya kemarin.

Ke Hal 14

(( Dari Hal 13

Terkait pemeriksaan mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) UPTD Terminal Bus Mangkang Joko Umoro pada Kamis (2/2), Wiyono belum bisa memastikan apakah akan kembali memanggil yang bersangkutan.

Namun, jika penyidik merasa perlu untuk kembali meminta keterangan Joko Umoro, tentu akan dilakukan pemanggilan lagi. "Sebelumnya, sudah diperiksa sebagai saksi," ucap Joko.

Saat diperiksa pada Kamis (2/2), Joko Umoro dicecar 50 pertanyaan dalam pemeriksa-

an yang berlangsung selama tujuh jam. Pemeriksaan tersebut diduga soal penyalahgunaan wewenang pada pengoperasian ilegal atas 8 unit BRT di Koridor III dan IV pada September-Oktober 2016. Saat itu, Joko Umoro yang kini bertugas di Kementerian Perhubungan, menjabat sebagai Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang, selaku otoritas yang membawahi BRT Trans Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abioso Seno Aji menegaskan, proses penyelidikan atas kasus dugaan korupsi itu terus berjalan.

"Tidak berhenti, kami bergerak terus. Soal trayek, jika belum ada izinnya lalu kemudian dioperasikan, berarti ilegal. Tenang saja, tentunya jika bukti-bukti sudah kuat, siapa pun yang terlibat akan diproses," tegasnya.

Diketahui, sebelumnya penyidik juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi. Di antaranya Agung Nurul Falaq Adi Wibowo selaku Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang, pengganti Joko Umoro, dalam kapasitas saksi pelapor. Agung adalah yang melaporkan adanya dugaan korupsi modus penyalahgunaan wewe-

ng tersebut. Pelaporan dilakukan pada 6 Januari 2017 ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang.

Penyidik juga telah memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Agus Harmunanto pada 22 Januari. Agus yang saat itu diperiksa sebagai saksi, diketahui kini menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Penyidik juga telah memeriksa pejabat dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Soal dugaan korupsi, informasi yang dihimpun ada 8 unit BRT Trans Semarang armada baru disewakan untuk beroperasi di Koridor 3 (Rute Pelabuhan Tanjung Emas-Jalan Singamangaraja) dan Koridor 4 (Rute Terminal Cangkiran-Bandara Ahmad Yani-Stasiun Tawang).

Sedianya armada baru itu belum boleh beroperasi karena rencananya digunakan untuk operasional Koridor VI (Rute Undip Tembalang dan Unnes Sekaran). Armada tersebut diduga disewakan dengan imbalan sekitar Rp200 juta.

● eka setiawan



Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang hasil hibah dari Kementerian Perhubungan diduga terjadi penyelewengan.